

## Privatisasi BUMN di Indonesia dalam masa krisis ekonomi Asia studi kasus privatisasi PT Indosat 1999-2002

Luli Bartini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=109341&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia dalam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai lembaga moneter internasional. Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai lembaga internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.

<br><br>

Privatisasi yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai salah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia lebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.

<br><br>

Untuk itu teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kepada liberalisme, sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP), Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adalah buku-buku Globalisasi, seperti Robert Gilpin, David Held maupun buku-buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglitz. Selain itu juga digunakan beberapa buku lainnya untuk melengkapi.

<br><br>

Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfan tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah restrukturisasi manajemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat

Indonesia sendiri.

<br><br>

Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan terhadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah.